



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY

Jalan Kusumanegara 9 Yogyakarta
Telp. : (0274) 512063; Fax : (0274) 581335
Surel : program_indagkop@yahoo.co.id
Laman : disperindag.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2024
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Daerah Istimewa
Yogyakarta,



Ir. SYAM ARJAYANTI, M.P.A. 4

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri”:
 - Diukur dengan indikator Nilai Ekspor Tahun n.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Pengembangan Ekspor, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar US\$ 630 Juta; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi US\$ 472,3 Juta. Dengan demikian capaian ini tidak melampaui target, dengan penilaian realisasi kinerja termasuk sedang. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 74,97%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Industri Pengolahan”:
 - Diukur dengan indikator Produktivitas Tenaga Kerja Industri.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar Rp 34 Juta/Orang; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi Rp 45,68 Juta/Orang. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 134,35%
3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah”:

- Diukur dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan RB dengan kategori A.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Ketatnya aturan impor ke negara-negara Eropa terutama untuk produk kayu (furniture, handicraft) sehingga pelaku usaha menjadi lebih berat untuk memenuhi persyaratan;
2. Ekspor produk Salak ke negara Vietnam terkendala belum adanya Perjanjian Kerjasama *Government to Government* yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
3. Kurangnya permintaan produk DIY dari pasar domestik maupun global juga berdampak pada produktivitas pelaku usaha sektor ini. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, selain itu resesi di negara tujuan ekspor utama DIY menyebabkan berkurangnya order dari negara-negara tersebut;
4. Meningkatnya biaya logistik ekspor impor akibat perang Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel;
5. Merebaknya tekstil impor ilegal hingga ke pasar-pasar eceran membuat terpuruknya industri tekstil dan produk tekstil nasional;
6. Permasalahan internal nasional masih menjadi kendala bagi para pelaku usaha seperti pajak dan perizinan usaha;
7. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar;
8. Adanya berbagai kesepakatan perdagangan bebas dan perkembangan teknologi informasi dan bisnis pendukung pemasaran online yang mendorong budaya belanja secara online, serta pulihnya sektor pariwisata memperluas peluang pasar produk DIY;
9. Keberadaan Perguruan-perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku-pelaku IKM di DIY;

10. Semakin berkembangnya pasar, sarana dan prasarana, serta bisnis penunjang yang mendukung perdagangan secara online;
11. Tingkat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang cukup tinggi akibat elnino dan mundurnya masa tanam;
12. Regenerasi IKM yang kurang berjalan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar	8
BAB I Pendahuluan	9
1.1. <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	9
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	11
1.3. Isu-Isu Strategis	14
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	15
1.5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022.....	18
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	20
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	21
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	23
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	30
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	34
BAB III Akuntabilitas Kinerja	38
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	38
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	66
3.3. Efisiensi Anggaran	72
3.4. Inovasi.....	74
3.5. Lintas Sektor	75
BAB IV Penutup	84
4.1. Kesimpulan	84
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	86
L A M P I R A N	88

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	15
Tabel I.2 Sarana-Prasarana.....	16
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2023.....	17
Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	18
Tabel II. 1 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY2023-2026	21
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan	22
Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	23
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2023	31
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2023	33
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	38
Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1.....	40
Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran 1.....	40
Tabel III. 5 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1	41
Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	49
Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran 2.....	50
Tabel III. 8 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	51
Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3.....	57
Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran 3	57
Tabel III. 11 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3 ...	58
Tabel III. 12 Target dan Realisasi SDGs Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2023.....	67
Tabel III. 13 Kontribusi Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah.....	68
Tabel III. 14 Kontribusi Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah.....	69
Tabel III. 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 ...	73
Tabel III. 16 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	76

Daftar Gambar

Gambar I.1 <i>Cascading Kinerja</i>	10
Gambar I.2 Struktur Organisasi	11
Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	12
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	35
Gambar II.2. Aplikasi JogjaKI	35
Gambar II.3. Aplikasi JBSC	36
Gambar II.4. Aplikasi SIKONCER	36
Gambar II.5. Aplikasi Jogjaplaza	37
Gambar III.1. Pelayanan Surat Keterangan Asal.....	44
Gambar III.2. Sosialisasi Tata Niaga Ekspor	44
Gambar III.3. Pemantauan Harga dan Stok Barang.....	45
Gambar III.4. Operasi Pasar	45
Gambar III.5. Pasar Murah	45
Gambar III.6. Pelatihan Ekspor.....	46
Gambar III.7. Forum Komunikasi JBSC.....	46
Gambar III.8. Sidang BPSK	47
Gambar III.9. Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa	47
Gambar III.10. Pelatihan Pemasaran Online	48
Gambar III.11. Jogja Fashion Week	53
Gambar III.12. Pameran Jakarta Fair	53
Gambar III.13. Layanan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	54
Gambar III.14. Bimtek Pelatihan Olahan Pangan	54
Gambar III.15. Sosialisasi SIINAS	55
Gambar III.16. Layanan Servis Keliling (SIKELING).....	55
Gambar III.17. Menu PKKI pada aplikasi Sengguh.....	64
Gambar III.18. Capaian PKKI Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Triwulan IV Tahun 2023.....	65

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

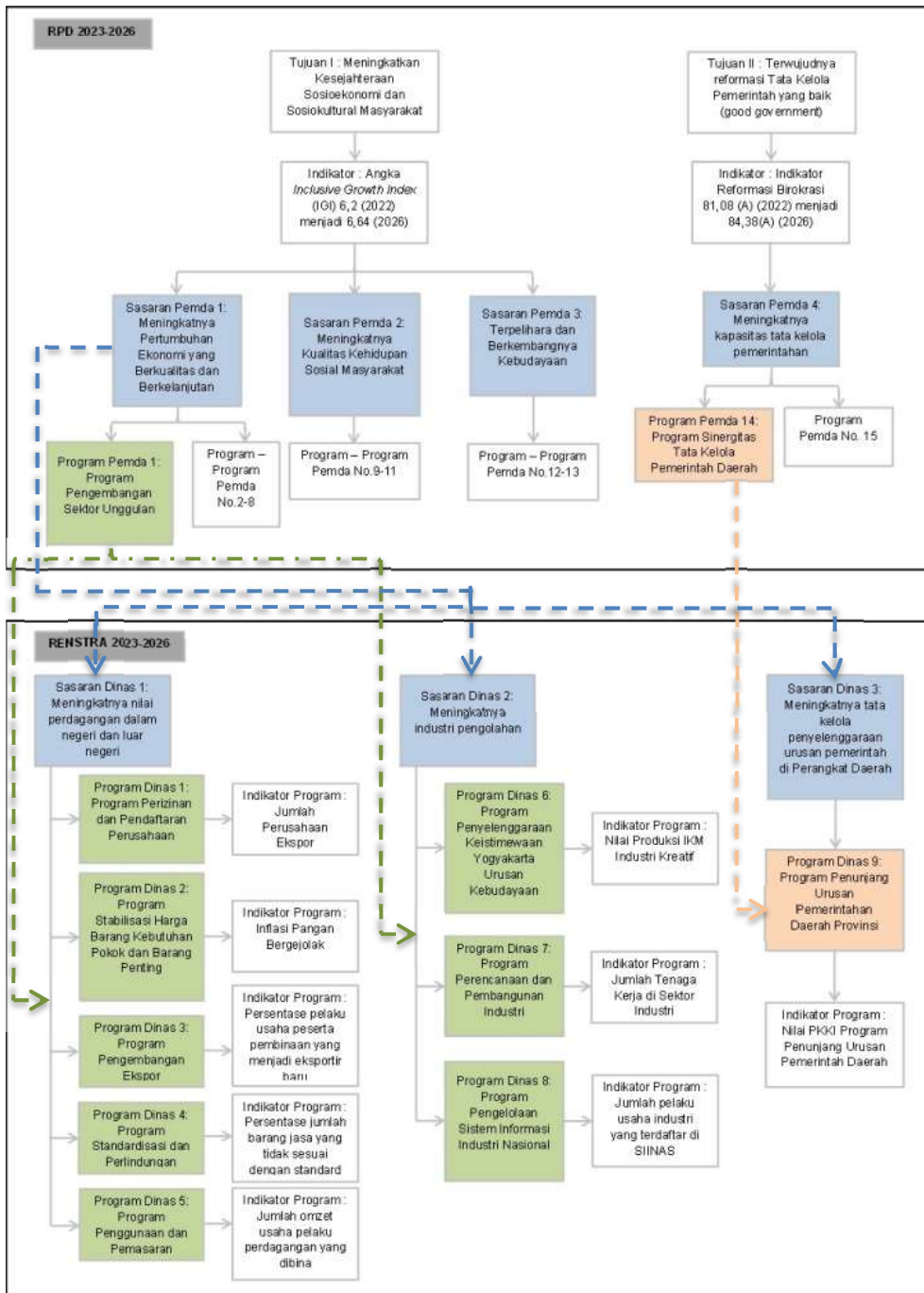
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

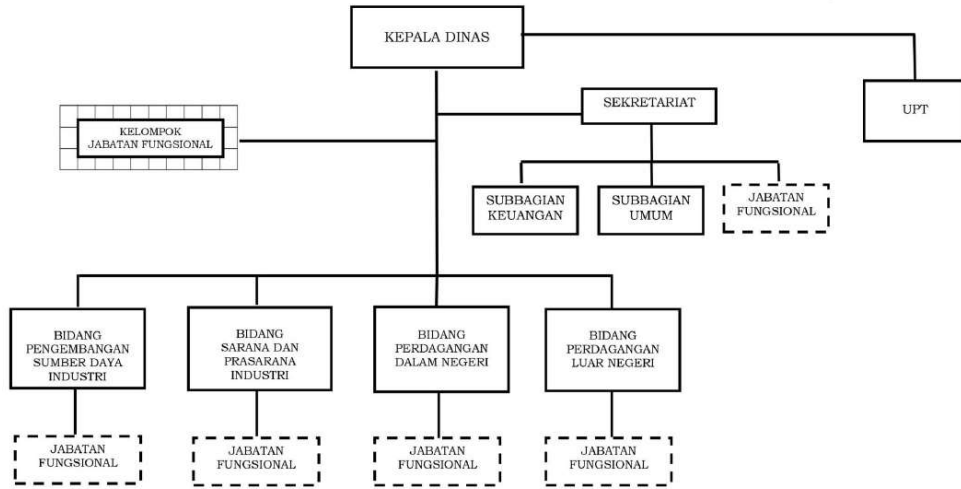
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 – 2026. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja



Sumber: RPD 2023-2026, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2023-2026

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. Adapun fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai berikut

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
3. pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
4. peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
5. peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
6. fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
7. pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
8. pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
9. fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan infrastruktur industri;
10. fasilitasi sarana dan prasarana industri;
11. pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
12. penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya;
13. fasilitasi rekayasa dan produksi alat tepat guna, layanan perbengkelan, konsultasi teknis dan informasi rekayasa alat tepat guna;
14. fasilitasi kemasan dan produk kulit;
15. pengawasan distribusi bahan berbahaya;
16. penerbitan Surat Keterangan Asal dan Fasilitasi Angka Pengenal Impor;
17. pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
18. pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
19. fasilitasi pengembangan dan promosi dalam negeri dan luar negeri;
20. pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
21. koordinasi dan fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
22. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
23. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
24. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
25. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Dinas;
26. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota;
27. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
28. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan; dan
29. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 tahun 2022 dapat dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbag Keuangan 2) Kasubbag Umum 3. Kabid Pengembangan Sumber Daya Industri 4. Kabid Sarana dan Prasarana Industri 5. Kabid Perdagangan Dalam Negeri 6. Kabid Perdagangan Luar Negeri 7. Kabalai Pengembangan Teknologi Tepat Guna <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Rekayasa dan Produksi 3) Kasi Pengembangan dan Layanan Kemasan dan Produk Kulit 8. Kabalai Pengelolaan Kekayaan Intelektual <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Pemberdayaan Kekayaan Intelektual 3) Kasi Fasilitasi Kekayaan Intelektual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Sekretaris: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Analis Sistem Informasi 2. Dibawah Kasubbag Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Keuangan; 3) Pengelola Gaji; 4) Pengelola Akuntansi; 5) Verifikator Data Laporan Keuangan 3. Dibawah Kasubbag Umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Teknisi Sarana dan Prasarana; 6) Kustodian Barang Milik Negara; 7) Pengemudi 4. Dibawah Kabid Pengembangan Sumber Daya Industri: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Pengembangan Usaha Agro Industri 5. Dibawah Kabid Sarana dan Prasarana Industri: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Industri 6. Dibawah Kabid Perdagangan Dalam Negeri: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perdagangan 3) Pengawas Barang Beredar dan Jasa 4) Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen 7. Dibawah Kabid Perdagangan Luar Negeri: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perdagangan 3) Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri 8. Dibawah Kasubag Tata Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan; 2) Pranata Kearsipan; 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Kustodian Barang Milik Negara; 6) Bendahara; 7) Pengadministrasi Keuangan; 8) Pengelola Gaji; 9) Pengelola Akuntansi; 10) Verifikator Data Laporan Keuangan; 11) Teknisi Sarana dan Prasarana 9. Dibawah Kasi Rekayasa dan Produksi <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna 2) Pengelola Produksi 10. Dibawah Kasi Pengembangan dan Layanan Kemasan dan Produk Kulit <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna 2) Pengelola Produksi 11. Dibawah Kasubag Tata Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan; 2) Pranata Kearsipan; 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Kustodian Barang Milik Negara; 6) Bendahara; 7) Pengadministrasi Keuangan; 8) Pengelola Gaji; 9) Pengelola Akuntansi; 10) Verifikator Data Laporan Keuangan; 11) Teknisi Sarana dan Prasarana 12. Dibawah Kasi Pemberdayaan Kekayaan Intelektual <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Kekayaan Intelektual 13. Dibawah Kasi Fasilitasi Kekayaan Intelektual <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”, antara lain sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha sektor perindustrian dan perdagangan
Angka kemiskinan di DIY yang masih tinggi, memerlukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Berkembangnya sektor perindustrian dan perdagangan akan berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, menumbuhkan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan
2. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan dalam negeri
Peningkatan volume produksi daerah lain dan masuknya produk-produk luar negeri ke pasar domestik akibat perdagangan bebas meningkatkan persaingan di pasar dalam negeri. Oleh karenanya peningkatan daya saing pelaku usaha sektor perdagangan perlu ditingkatkan agar dapat memenangkan persaingan.
3. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan luar negeri
Perdagangan bebas membuka peluang bagi semua negara untuk menjual produknya ke negara lain. Hal ini mendorong peningkatan produktivitas negara-negara tersebut. Untuk memenangkan persaingan tersebut daya saing pelaku usaha sektor perdagangan luar negeri DIY harus tinggi.
4. Pengembangan industri kreatif
Industri kreatif merupakan sektor yang dapat memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pelakunya. Tersedianya sumber daya manusia kreatif di DIY merupakan penunjang utama pengembangan sektor ini. Pemusatan industri yang memiliki potensi polusi tinggi di kawasan industri merupakan hal yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan industri di DIY.
5. Kekeringan panjang akibat El Nino yang berdampak pada produktivitas pertanian, seperti komoditas cabai, bawang merah, dan termasuk komoditas impor, seperti gula pasir. Selain itu, juga masih terbatasnya pasokan beras

seiring mundurnya musim tanam yang berkontribusi pada peningkatan tingkat inflasi bahan pangan.

6. Penurunan permintaan produk ekspor akibat krisis ekonomi di Negara-negara tujuan ekspor utama (Amerika dan Eropa) dan kenaikan biaya logistik akibat perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina.
7. Berkembangnya ekonomi digital yang membuka peluang sekaligus memperketat persaingan bagi pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY
8. Berkembangnya implementasi ekonomi syariah dan ekonomi hijau.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada					Jenis Kelamin			
		JML	Kualifikasi				JML	Kualifikasi					L	P
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
1	2	3	4				5	6					7	8
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1						1
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	7	7				6	6					3	3
	2. Pengawas	8		8			7	4	3				4	3
	3. Pelaksana	113		73	39	1	47	7	17	4	18	1	28	19
C	Jabatan Fungsional	28		26	2		28	7	19	2			21	7
	Jumlah	157					89						56	33

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 39 orang (43,82%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 25 orang (28,10%), SLTA sebanyak 18

orang (20,22%), D3 sebanyak 6 orang (6,74%), SMP sebanyak 1 orang (1,12%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; namun persentase untuk jabatan struktural berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 50% laki-laki dan 50% perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 68 orang, terdiri dari 1 orang jabatan administrator, 1 orang jabatan pengawas dan 66 orang jabatan pelaksana. Untuk jabatan administrator, formasi yang ada sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY No 15 tahun 2021 ada 7 formasi, tetapi keterisian formasi masih berjumlah 6 karena ada pejabat administrator ASN yang purna dan belum ditetapkan pejabat definitif (Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri). Formasi pada jabatan pengawas sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY No 15 tahun 2021 ada 8 formasi, tetapi saat ini hanya terisi 7 formasi karena terdapat ASN (jabatan pengawas) yang purna tugas dan belum ditetapkan pejabat definitif (Kepala Seksi Pelayanan Pengembangan Kemasan dan Produk Kulit). Untuk jabatan pelaksana, ketugasan pegawai dapat diampu oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY sebanyak 39 orang yang tersebar di Induk sebanyak 15 orang, BPTTG sebanyak 22 orang, dan BPKI sebanyak 2 orang. Sehingga kekurangan pegawai untuk mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 29 orang. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana pemerintahan di bidang industri dan perdagangan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
2	Tanah	11 unit	20.608.532.000
3	Peralatan dan Mesin	3.370 unit	47.469.235.645
4	Gedung dan Bangunan	28 unit	28.939.233.071
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15 unit	6.452.968.800
6	Aset Tetap Lainnya	193 unit	98.642.450
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2 unit	109.700.000
8	Aset Lainnya		
9	Aset Tidak Berwujud	9 unit	411.793.500
10	Aset Lain-lain	96 unit	699.035.000

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Jumlah		104.789.140.466

Sumber: Data Neraca Dinas Perindustrian dan Perdagangan 31 Desember 2023 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 11 (sebelas) unit kendaraan operasional, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, tempat parkir, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	252.200.000	275.400.000	23.200.000
4 1 02	Retribusi Daerah	217.200.000	250.400.000	33.200.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	35.000.000	25.000.000	(10.000.000)
	Jumlah Pendapatan	252.200.000	275.400.000	23.200.000
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	45.938.556.904	46.541.022.680	602.465.773
5 1 01	Belanja Pegawai	16.570.095.407	15.804.076.130	(766.019.277)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.536.991.600	24.905.476.650	1.368.485.050
5 1 05	Belanja Hibah	5.831.469.900	5.831.469.900	0
5 2	BELANJA MODAL	6.494.277.300	5.705.542.080	(788.735.220)
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.960.300	220.935.080	102.974.780

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.376.317.000	5.484.607.000	(891.710.000)
			Jumlah Belanja	52.432.834.207	52.246.564.760	(186.269.447)
			Total Surplus/(Defisit)	(52.180.634.207)	(51.971.164.760)	209.469.447
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
			Pembiayaan Neto	0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berasal dari APBD DIY dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY semula Rp 52.432.834.207 dan mengalami perubahan menjadi Rp 52.246.564.760 atau berkurang Rp 186.269.447. Perubahan anggaran tahun 2023 merupakan cerminan dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam bentuk realokasi anggaran untuk mendukung layanan dan efisiensi anggaran.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik	Disperindag DIY telah dan akan menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;	internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
2.	Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yaitu meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri, dan meningkatnya industri pengolahan.	Disperindag DIY telah dan akan meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yaitu meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri, dan meningkatnya industri pengolahan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Instrumen Pendukung
6. Capaian Kinerja OPD

Tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 -2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPD DIY Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan” serta “Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY selama empat tahun adalah:

“Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”

Adapun sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam waktu empat tahun sebagai berikut:

Tabel II. 1 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2023-2026

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai Ekspor Tahunan	US\$ Juta	573	630	694	763	839	839
2.	Meningkatnya industri pengolahan	Produktivitas Tenaga Kerja Industri	Rp Juta/Orang	33	34	35	36	37	37
3.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	A

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk industri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik konvensional maupun online	Peningkatan penggunaan produk industri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
		Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kelancaran distribusi dan stabilisasi harga	Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga
		Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY	Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor
2.	Meningkatnya industri pengolahan	Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk
		Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (<i>Green Sector</i>)	Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (<i>Green Sector</i>)
		Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk Industri Kreatif	Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mengembangkan entrepreneurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan	Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha
		Koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	Koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM
		Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY
3.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan standarisasi	Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	1.1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	29.788.700	29.788.700	0
	1.1.1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	29.788.700	29.788.700	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	29.788.700	29.788.700	0
	1.2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	624.883.900	1.624.883.900	1.000.000.000
	1.2.1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	624.883.900	1.624.883.900	1.000.000.000
	1.2.1.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Barag Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	52.613.300	52.613.300	0
	1.2.1.2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	572.270.600	1.572.270.600	1.000.000.000
	1.3. Program Pengembangan Ekspor	130.212.000	130.212.000	0
	1.3.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	130.212.000	130.212.000	0
	1.3.1.1. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	130.212.000	130.212.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	283.336.300	283.336.300	0
	1.4.1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	261.334.300	261.334.300	0
	1.4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	261.334.300	261.334.300	0
	1.4.2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	22.002.000	22.002.000	0
	1.4.2.1. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	22.002.000	22.002.000	0
	1.5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.775.000.000	1.775.000.000	0
	1.5.1. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.775.000.000	1.775.000.000	0
	1.5.1.1. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.775.000.000	1.775.000.000	0
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	2.843.220.900	3.843.220.900	1.000.000.000
2. Meningkatnya industri pengolahan	2.1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	19.964.702.000	19.981.874.430	17.172.430

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.1.1. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	19.964.702.000	19.981.874.430	17.172.430
	2.1.1.1. Pengembangan Industri Kreatif	19.964.702.000	19.981.874.430	17.172.430
	2.2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	9.742.934.750	9.300.249.750	(442.685.000)
	2.2.1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	9.742.934.750	9.300.249.750	(442.685.000)
	2.2.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000	50.000.000	0
	2.2.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	9.236.977.150	8.814.992.150	(421.985.000)
	2.2.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	455.957.600	435.257.600	(20.700.000)
	2.3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	104.483.400	104.483.400	0
	2.3.1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	104.483.400	104.483.400	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.3.1.1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analiss Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	104.483.400	104.483.400	0
	2.4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan *)	0	160.000.000	160.000.000
	2.4.1. Peningkatan Budaya Pemerintahan	0	160.000.000	160.000.000
	2.4.1.1. Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	0	160.000.000	160.000.000
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 2	29.812.120.150	29.546.607.580	(265.512.570)
3. Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.777.493.057	18.856.736.180	(920.756.877)
	3.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.540.400	75.540.400	0
	3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.098.000	36.098.000	0
	3.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.940.000	15.940.000	0
	3.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.502.400	23.502.400	0
	3.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.557.934.407	15.791.915.130	(766.019.277)
	3.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.463.415.407	15.697.396.130	(766.019.277)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	3.1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.980.000	70.980.000	0
	3.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.764.100	11.764.100	0
	3.1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.774.900	11.774.900	0
	3.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.115.000	43.115.000	0
	3.1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.115.000	43.115.000	0
	3.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	428.179.300	423.580.300	(4.599.000)
	3.1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.678.100	27.678.100	0
	3.1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.184.000	49.588.000	(1.596.000)
	3.1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.610.400	28.610.400	0
	3.1.4.4. Penyediaan bahan Logistik Kantor	7.203.000	4.200.000	(3.003.000)
	3.1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.620.000	67.620.000	0
	3.1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.468.800	7.468.800	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	3.1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.729.000	160.729.000	0
	3.1.4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	77.686.000	77.686.000	0
	3.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.811.300	116.472.700	(1.338.600)
	3.1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.811.300	116.472.700	(1.338.600)
	3.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.110.556.200	1.961.756.200	(148.800.000)
	3.1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	897.565.000	748.765.000	(148.800.000)
	3.1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.212.991.200	1.212.991.200	0
	3.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.356.450	444.356.450	0
	3.1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.333.400	29.333.400	0
	3.1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.238.750	308.238.750	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	3.1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.844.400	25.844.400	0
	3.1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.000.000	47.000.000	0
	3.1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.940.000	33.940.000	0
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 3	19.777.493.057	18.856.736.180	(920.756.877)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Keterangan:

*) Anggaran tersebut untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Industri Pengolahan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan, Subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan DIY dengan aktivitas kegiatan Layanan Servis Keliling (Sikeling) yang dilakukan oleh UPT Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG).

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai ekspor tahunan	US\$ Juta	630	Triwulan I	157,5
					Triwulan II	315
					Triwulan III	472,5
					Triwulan IV	630
2.	Meningkatnya industri pengolahan	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp Juta/orang	34	Triwulan I	8,5
					Triwulan II	17
					Triwulan III	25,5
					Triwulan IV	34
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (APBD)	Rp 29.788.700
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (APBD)	Rp 624.883.900
3.	Program Pengembangan Ekspor (APBD)	Rp 130.212.000
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (APBD)	Rp 283.336.300
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (APBD)	Rp 1.775.000.000
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD)	Rp 9.742.934.750
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (APBD)	Rp 104.483.400

No	Program RPD	Anggaran
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS)	Rp 19.964.702.000
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 19.777.493.157
	Jumlah Anggaran	Rp 52.432.834.207

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi :
 - a. Program Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 204.751.000
 - b. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 105.342.000
 - c. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Industri Rp 680.949.000
 - d. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Subkegiatan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi Rp 301.511.000
 - e. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 69.840.000
 - f. Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 443.272.000

Pada tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai ekspor tahunan	US\$ Juta	630	Triwulan I	157,5
					Triwulan II	315
					Triwulan III	472,5
					Triwulan IV	630
2.	Meningkatnya industri pengolahan	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp Juta/orang	34	Triwulan I	8,5
					Triwulan II	17
					Triwulan III	25,5
					Triwulan IV	34
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (APBD)	Rp 29.788.700
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (APBD)	Rp 1.624.883.900
3.	Program Pengembangan Ekspor (APBD)	Rp 130.212.000
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (APBD)	Rp 283.336.300
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (APBD)	Rp 1.775.000.000
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD)	Rp 9.300.249.750

No	Program RPD	Anggaran
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (APBD)	Rp 104.483.400
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS)	Rp 19.981.874.430
9.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp 160.000.000
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 18.856.736.280
	Jumlah Anggaran	Rp 52.246.564.760

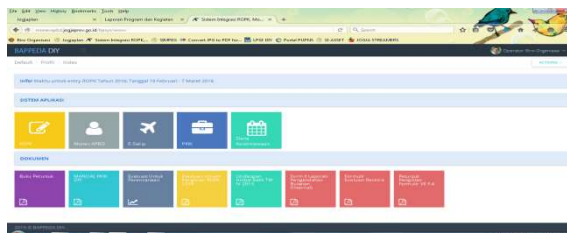
2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi :
 - a. Program Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 117.160.000
 - b. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 54.954.000
 - c. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Industri Rp 680.949.000
 - d. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Subkegiatan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi Rp 301.511.000
 - e. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 69.840.000
 - f. Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 443.272.000

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk

Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

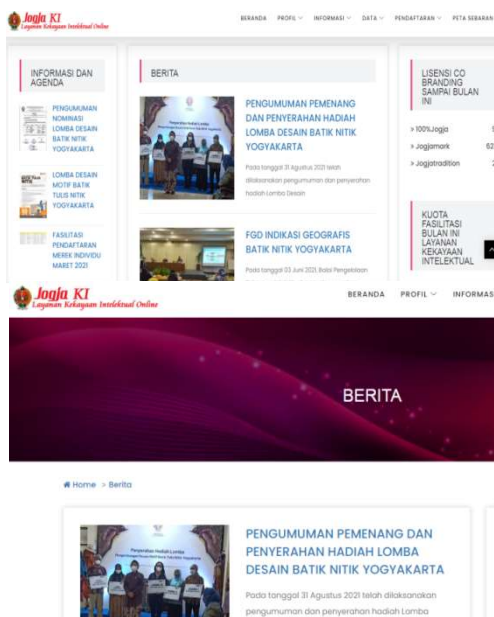
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Layanan Konsultasi dan Pendaftaran Fasilitas HKI secara online. Layanan ini menggunakan aplikasi JogjaKI. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi dan fasilitas HKI secara online.

Gambar II.2. Aplikasi JogjaKI

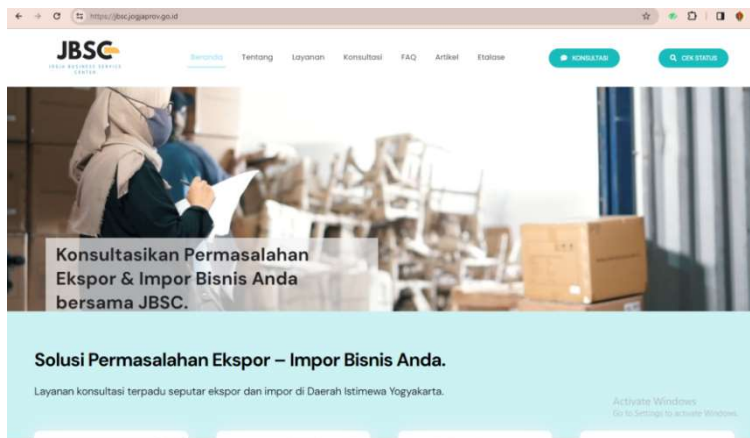


Sumber: <https://disperindag.jogjaprov.go.id/haki/>

3. Layanan konsultasi terpadu seputar ekspor dan impor di Daerah Istimewa Yogyakarta secara online. Layanan ini menggunakan aplikasi JBSC (*Jogja*

Business Service Center). Aplikasi ini merupakan wadah yang memfasilitasi pelaku usaha di DIY untuk berkonsultasi mengenai permasalahan dan kendala terkait ekspor impor dan bisnis secara umum. Perwakilan dari berbagai instansi dilibatkan sebagai operator dan konsultan pada aplikasi ini.

Gambar II.3. Aplikasi JBSC



Sumber: <https://jbsc.jogjapro.go.id/>

4. Aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER) merupakan layanan pengaduan konsumen secara online.

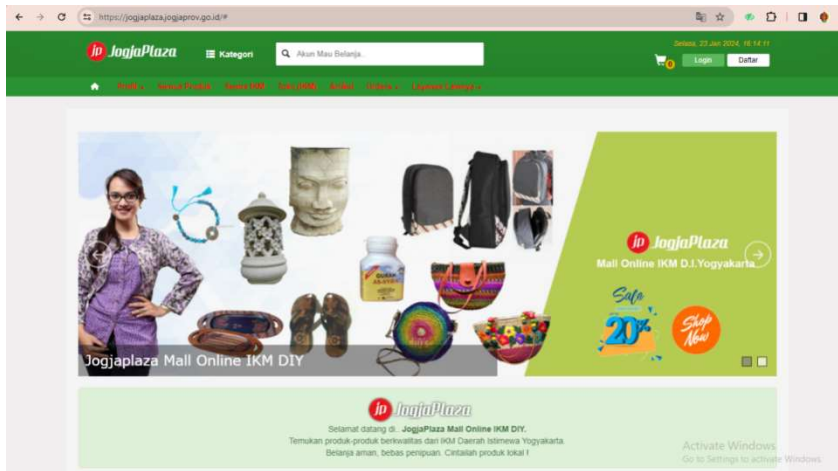
Gambar II.4. Aplikasi SIKONCER



Sumber: <https://disperindag.jogjapro.go.id/sikoncer/>

5. Aplikasi Jogjaplaza merupakan aplikasi mall online yang merupakan salah satu bentuk fasilitasi kepada pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas secara online. Aplikasi ini beralamatkan di <https://jogjaplaza.jogjaprovo.go.id/>

Gambar II.5. Aplikasi Jogjaplaza



Sumber: <https://jogjaplaza.jogjaprovo.go.id/>

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Capaian Kinerja Lainnya*
3. *Efisiensi Anggaran*
4. *Inovasi*
5. *Lintas Sektor*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Base Line 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023				Target Akhir Rpd
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	<u>Indikator:</u> Nilai Ekspor Tahun n <u>Meta Indikator:</u> Total Nilai Ekspor Januari	US \$ Juta	521	583,3	630	472,3	74,97	Sedang	839

No	Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Base Line 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023				Target Akhir Rpd
						Target	Realisasi	Persen Tase	Kriteria/Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		– Desember tahun n (BPS)								
2	Meningkatnya industri pengolahan	<u>Indikator:</u> Produktivitas tenaga kerja industri <u>Meta</u> <u>Indikator:</u> PDRB sektor industri pengolahan tahun n dibagi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan tahun n (BPS)	Rp Juta/Orang	32	33,30	34	46,06	135,47	Sangat Baik	37
3	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	<u>Indikator:</u> Kategori Perangkat Daerah <u>Meta</u> <u>Indikator:</u> Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian indeks RB tahun n dengan predikat Sangat Baik (A)	kategori	A	A	A	A	100	Sangat Baik	A

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri”

Kinerja sasaran “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri” diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai Ekspor Tahun n	Total Nilai Ekspor Januari – Desember tahun n (BPS)

Kinerja sasaran “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri” pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Ekspor Tahun n <u>Meta Indikator:</u> Total Nilai Ekspor Januari – Desember tahun n (BPS)	US\$ 583,3 Juta	US\$ 630 Juta	US\$ 472,3 Juta {nilai ekspor Januari-Desember (BPS)}	74,97% [[472,3/630) x 100%]	US\$ 839 Juta	56,29%

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri” adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ekspor DIY tahun 2023 mencapai US\$ 472,3 Juta, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 75,43% (tidak terlampaui). Total nilai ekspor diperoleh dari Berita Resmi Statistik Perkembangan Ekspor dan Impor DIY, Desember 2023 yang dirilis BPS pada tanggal 1 Februari 2024.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar US\$ 583,3 juta, terdapat penurunan sebesar US\$ 111 Juta.

- c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 56,29%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator “Total Nilai Ekspor Tahun n” tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 5 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Jumlah Perusahaan Ekspor	515 Perusahaan	546 Perusahaan	106,02%
	1.1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				
	1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	24.900 Dokumen	12.566 Dokumen	50,47%
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Inflasi pangan bergejolak	2,21%	6,47%	-92,76%
	2.1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				
	2.1.1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku			

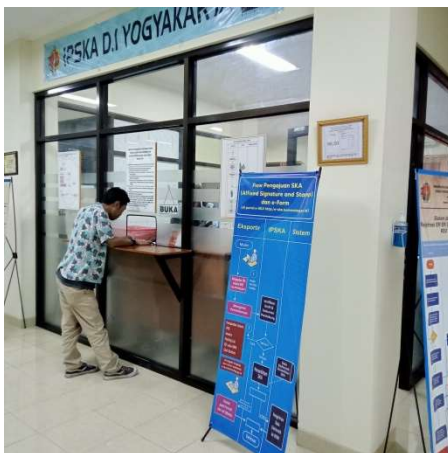
Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			
	2.1.2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100%
3. Program Pengembangan Ekspor		Persentase pelaku usaha pembinaan yang menjadi eksportir baru	17%	45%	264,71%
	3.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				
	3.1.1. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	230 Pelaku Usaha	230 Pelaku Usaha	100%
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	2,21%	2,19%	100,9%
	4.1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
	4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	35 Pengaduan	40 Pengaduan	114,29%
	4.2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
	4.2.1. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta	1 Laporan	1 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (Rp. Milyar)	Rp 2,63 Milyar	Rp 9,17 Milyar	348,67%
	5.1. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri				
	5.1.1. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	1090 UMKM	1155 UMKM	105,96%

Capaian tersebut didukung dari :

- a. Capaian Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Jumlah perusahaan ekspor” dengan target 515 perusahaan, tercapai 546 perusahaan atau melampaui target tahun 2023. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan diantaranya adalah pelayanan Surat Keterangan Asal dan sosialisasi Tata Niaga Ekspor.

Gambar III.1. Pelayanan Surat Keterangan Asal



Gambar III.2. Sosialisasi Tata Niaga Ekspor



- b. Capaian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Indikator “Inflasi pangan bergejolak” dengan target 2,21%, tercapai 6,47% atau tidak melampaui target tahun 2023. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diantaranya adalah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, operasi pasar, dan pasar murah.

Gambar III.3. Pemantauan Harga dan Stok Barang



Gambar III.4. Operasi Pasar



Gambar III.5. Pasar Murah



- c. Capaian Program Pengembangan Ekspor yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru” dengan target 17%, tercapai 45% atau melampaui target tahun 2023. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Pengembangan Ekspor diantaranya Pelatihan Ekspor dan Forum Komunikasi JBSC.

Gambar III.6. Pelatihan Ekspor



Gambar III.7. Forum Komunikasi JBSC



- d. Capaian Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Indikator “Persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard” dengan target 2,21%, tercapai 2,19% atau melampaui target tahun 2023. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diantaranya adalah layanan pengaduan konsumen yang ditangani oleh

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa.

Gambar III.8. Sidang BPSK



Gambar III.9. Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa



- e. Capaian Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina” dengan target Rp 2,63 Milyar, tercapai Rp 9,17 Milyar atau melampaui target tahun 2023. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri diantaranya adalah pelatihan pemasaran online.

Gambar III.10. Pelatihan Pemasaran Online



Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Berkembangnya media pemasaran online.
- b. Tumbuhnya wirausaha baru di sektor perdagangan.
- c. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut sehingga aktivitas perekonomian sudah mulai membaik.
- d. Meningkatnya aktivitas kepariwisataan.
- e. Aktivitas industri mulai pulih yang berdampak pada aktivitas perdagangan.
- f. Peningkatan harga komoditi dunia sehingga mendorong peningkatan ekspor DIY.
- g. Adanya sinyal positif pada kedua negara tujuan ekspor DIY seperti pembukaan ekonomi Tiongkok pascapandemi Covid 19.
- h. Disperindag telah melakukan berbagai upaya non budgeter untuk meningkatkan nilai ekspor DIY diantaranya adalah:
 - 1) menyelenggarakan Business Matching bekerjasama dengan KBRI dan DPMPTSP sebanyak 10 kali selama tahun 2023 untuk mempertemukan antara Buyer dari Australia, Kanada, Mesir dengan IKM Ekspor DIY. Dari 10 Business Matching tersebut, semua menghasilkan Kontrak Dagang;
 - 2) Kerjasama dengan Paguyuban IKM dan Universitas untuk menyelenggarakan Pelatihan Ekspor;
 - 3) bekerjasama dengan Bank Indonesia, UGM, Paguyuban Salak mengadakan kajian teknologi pengawetan salak sehingga dapat didistribusikan ke negara tujuan ekspor dengan kondisi yang masih segar.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Ketatnya aturan impor ke negara-negara Eropa terutama untuk produk kayu (furniture, handicraft) sehingga pelaku usaha menjadi lebih berat untuk memenuhi persyaratan.
- b. Krisis ekonomi di Negara-negara tujuan utama ekspor DIY seperti Amerika dan Eropa yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor komoditi pakaian jadi dan tekstil, dimana kedua komoditi tersebut merupakan komoditi ekspor DIY.
- c. Adanya perang Rusia-Ukraina dan Palestina – Israel menyebabkan biaya logistik ekspor impor mahal.
- d. Permasalahan internal nasional masih menjadi kendala bagi para pelaku usaha seperti pajak dan perizinan usaha.
- e. Ekspor produk Salak ke negara Vietnam, terkendala belum adanya Perjanjian Kerjasama *Government to Government* yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- f. Dampak pandemi yang belum 100% pulih menyebabkan daya beli negara tujuan ekspor belum pulih.
- g. Menurunnya omset selama pandemi corona mengakibatkan melemahnya modal usaha pelaku usaha sektor industri Proses promosi dan pemasaran produk pelaku usaha sektor industri tidak dapat dilaksanakan karena biaya promosi dan pemasaran tidak dapat dipenuhi.
- h. Sebagian pelaku usaha belum memiliki kemampuan untuk melakukan pemasaran secara online.

3.1.2. Sasaran 2: “Meningkatnya industri pengolahan”

Kinerja sasaran “Meningkatnya industri pengolahan” diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya industri pengolahan	Produktivitas tenaga kerja industri	PDRB sektor industri pengolahan tahun n dibagi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan tahun n (BPS)

Kinerja sasaran “Meningkatnya industri pengolahan” pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produktivitas tenaga kerja industri <u>Meta Indikator:</u> PDRB sektor industri pengolahan tahun n dibagi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan tahun n (BPS)	Rp 33,30 Juta/Orang	Rp 34 Juta/Orang	Rp 45,68 Juta/Orang [{PDRB sektor industri pengolahan Atas Dasar Harga Konstan/ jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan}]	134,35 % [(45,68 / 34) x 100%]	Rp 37 Juta/Orang	123,46%

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: “Meningkatnya industri pengolahan” adalah sebagai berikut:

- a. Produktivitas tenaga kerja industri mencapai Rp 45,68 Juta/Orang, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 134,35% (terlampaui). Nilai PDRB sektor industri pengolahan Atas Dasar Harga Konstan diperoleh dari Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan IV 2023 yang dirilis BPS pada tanggal 5 Februari 2024. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri diperoleh dari Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan DIY Agustus 2023 yang dirilis BPS pada tanggal 6 November 2023.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 33,30 Juta/Orang, terdapat peningkatan sebesar Rp 12,38 Juta/Orang.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 123,46%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator “Produktivitas Tenaga Kerja Industri” tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 8 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Nilai Produksi IKM Industri Kreatif (Rp. Trilyun)	Rp 6,8 Trilyun	Rp 6,804 Trilyun	100,06%
	1.1. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				
	1.1.1. Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	7009 Unit	7974 Unit	100%
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	412.630 Orang	294.030 Orang	71,26%
	2.1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				
	2.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	2.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	365 Perusahaan	1.253 Perusahaan	343,29%
	3.1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				
	3.1.1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	40%	40%	100%
	4.1. Peningkatan Budaya Pemerintahan				
	4.1.1. Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Capaian tersebut didukung dari:

- a. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Nilai produksi IKM industri kreatif” dengan target Rp 6,8 Trilyun, tercapai Rp 6,804 Trilyun atau melampaui target tahun 2023. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan diantaranya Jogja Fashion Week dan Pameran Jakarta Fair.

Gambar III.11. Jogja Fashion Week



Gambar III.12. Pameran Jakarta Fair



- b. Capaian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Indikator “Jumlah tenaga kerja di sektor industri” dengan target 412.630 orang, tercapai 294.030 orang atau tidak

melampaui target tahun 2023. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri diantaranya layanan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan bimtek pelatihan olahan pangan.

Gambar III.13. Layanan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual



Gambar III.14. Bimtek Pelatihan Olahan Pangan



- c. Capaian Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS” dengan target 365 perusahaan, tercapai 1.253

perusahaan atau melampaui target tahun 2023. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional diantaranya sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) bagi pelaku usaha industri.

Gambar III.15. Sosialisasi SIINAS



- d. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik” dengan target 40%, tercapai 40% atau melampaui target tahun 2023. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan diantaranya layanan Servis Keliling (SIKELING).

Gambar III.16. Layanan Servis Keliling (SIKELING)



Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Berkembangnya media pemasaran online.
- b. Tumbuhnya wirausaha baru di sektor perindustrian.
- c. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut sehingga aktivitas perekonomian sudah mulai membaik.
- d. Meningkatnya aktivitas kepariwisataan.
- e. Meningkatnya aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang berdampak terhadap tumbuhnya IKM pangan.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Menurunnya omset selama pandemi covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini mengakibatkan melemahnya modal usaha pelaku usaha sektor industri Proses produksi sebagian IKM tidak dapat dilakukan karena biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja, energi) tidak dapat dipenuhi.
- b. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut menyebabkan naiknya harga energi dan minyak dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya harga bahan baku impor. Imbasnya terhadap para pelaku usaha industri yang menggunakan bahan baku impor yang kesulitan yang mendapatkan bahan baku.
- c. Eropa merupakan pensuplai gandum terbesar di dunia. Adanya perang Rusia-Ukraina berdampak pada kelangkaan gandum. Hal ini menjadi kendala bagi industri yang berbahan baku gandum mengingat gandum merupakan bahan baku dari produk pangan.
- d. Kenaikan BBM menyebabkan naiknya inflasi dan harga bahan baku sehingga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya sektor industri.
- e. Peningkatan biaya produksi seiring dengan kenaikan UMP 2023.
- f. Ketidakpastian kondisi ekonomi global dan lesunya aktivitas ekonomi Negara-Negara ekonomi utama seperti Amerika Serikat dan Kawasan Eropa.
- g. Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi DIY disebabkan oleh kinerja ekspor yang masih berkontraksi. Beberapa subsektor industri pengolahan yang berorientasi ekspor juga masih tumbuh melambat (seperti industri furniture dan kulit).
- h. Kenaikan harga beras dan telur ayam ras sebagai bahan baku dari produk pangan.

- i. Merembaknya tekstil impor ilegal hingga ke pasar-pasar eceran membuat terpuruknya industri tekstil dan produk tekstil nasional.

3.1.3. Sasaran 3: “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah”

Tolok ukur capaian sasaran “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah” sebagaimana indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

N O	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Kinerja sasaran “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di perangkat daerah” pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran 3

N o	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	100%	A	100%

Analisis Ketercapaian Sasaran 3: “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”

- a. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai nilai 91,50 dengan predikat Memuaskan (A), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (terlampau).

- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 82,90 dengan predikat Memuaskan (A) terdapat kenaikan nilai sebesar 110,37%.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 100%.

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator “Kategori RB Perangkat Daerah” tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 11 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	91,85	91,85%
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
		Perangkat Daerah			
	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 89 Orang/Bulan dari 97 Orang/Bulan 2. Tersedianya Gaji Tenaga Bantu Daerah : 39 Orang dari 39 Orang	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 97 Orang/Bulan 2. Tersedianya Gaji Tenaga Bantu Daerah : 39 Orang	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 89 Orang/Bulan 2. Tersedianya Gaji Tenaga Bantu Daerah : 39 Orang	100%
	1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100%
	1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	13 Laporan	100%
	1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	10%
	1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap	53 Paket	53 Paket	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
		an Kantor yang Disediakan			
	1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	100%
	1.4.4. Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10%
	1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	100%
	1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	10%
	1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%

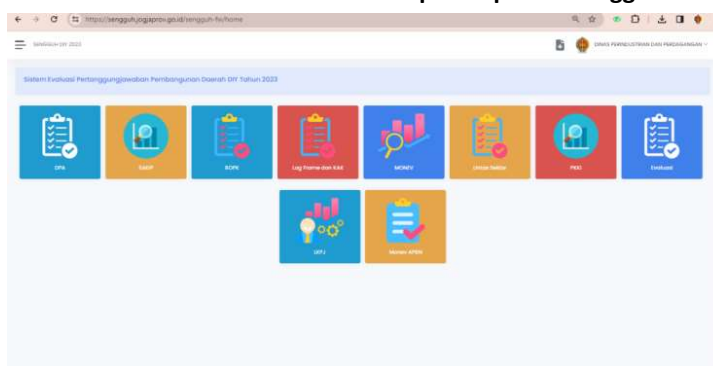
Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	1.4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	100%
	1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%
	1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	100%
	1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit	100%
	1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit	100%

Capaian tersebut didukung dari capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Dari Indikator “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dengan target skor 100 tercapai skor 91,85 atau tidak melampaui target skor tahun 2023. Instrumen pendukung capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu aplikasi Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah) yang dapat diakses melalui <http://sengguh.jogjaprov.go.id>. Sengguh membantu melaksanakan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja (sasaran hingga sub kegiatan) organisasi perangkat daerah. Penilaian kinerja setiap sub kegiatan organisasi perangkat daerah terdapat pada menu PKKI.

Gambar III.17. Menu PKKI pada aplikasi Sengguh



Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id>

Gambar III.18. Capaian PKKI Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Triwulan IV Tahun 2023

K. Gambaran Umum Kinerja Kapasitas Organisasi (learning & growth perspective)			
No	Komponen	Kualifikasi	Penjelasan
1	Kualitas Lintas Sektor	Baik	Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah melaporkan pelaksanaan kolaborasi lintas sektor baik pada tahap pemusatan kebijakan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Lintas sektor yang dilakukan juga ada yang berkaitan dengan RB Tematik, yaitu pengendalian inflasi daerah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
2	Kualitas Logframe	Baik	Logframe telah disusun pada semua program dengan target kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan.
3	Kualitas KAK	Baik	Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, mayoritas sub kegiatan sudah disusun KAK secara lengkap dengan penjasan latar belakang dan tujuan atas target yang diharapkan, menjadikan penerima manfaat, dasar pelaksanaan kegiatan sudah disampaikan dengan jelas.
4	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK baik maupun keuangan yang sudah disusun dengan baik, mudah dipahami proses pencapaian outputnya serta tidak ada Bahasa belanda dalam ROPK Fisik.
5	Inovasi/Kebaruan	Baik	Diungkapkan apresiasi terhadap beberapa inovasi yang dihasilkan. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi pengungkit ketercapaian kinerja PD secara lebih optimal khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

No	Program/Sub Kegiatan	Score
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	85,00
4.1	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	85,00
5	PROGRAM STANDARISASI DAN PENUNJANGAN KONSUMEN	85,00
5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Standarisasi Konsumen	85,00
5.2	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Keterbacaan Perindungan Konsumen	85,00
6	PROGRAM PENUNJANGAN DAN PELAKSANAAN PRODUK DALAM NEGERI	85,00
6.1	Facilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	81,67
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	91,10
7.1	Penyusunan Dokumen Pemasaran Perangkat Daerah	81,67
7.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	81,67
7.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81,67
7.4	Penyediaan Uji dan Uji Tergelincir ASN	81,67
7.5	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85,00
7.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	85,00
7.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	85,00
7.8	Penrausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	85,00
7.9	Penyediaan Komponen Infotika/Perangan Bangunan Kantor	85,00
7.10	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	85,00
7.11	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	85,00
7.12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85,00
7.13	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	85,00
7.14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Penunjang Undangan	85,00
7.15	Penyeterangan Bagor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85,00
7.16	Diagnosis Kelembagaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	81,67
7.17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81,30
7.18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81,30
7.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81,30
7.20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81,30
7.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	81,30
7.22	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	81,40
7.23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81,40
7.24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81,40
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	81,67
8.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	81,67
8.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	81,67
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	81,67
9.1	Facilitasi Pengempuran, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIInet)	81,67
Rata-rata		91,85

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id>, Dokumen PKKI Triwulan IV Tahun 2023

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Adanya sarana prasarana teknologi pendukung seperti SIPD, Jogja Plan, Sengguh, E-Lapor, SIPPN, core reform space.

Faktor Penghambat keberhasilan (Jika indikator kinerja tidak tercapai)

- a. Banyak ASN yang pensiun.
- b. Sarana prasarana pendukung (seperti komputer, laptop, kendaraan) belum sebanding dengan jumlah kegiatan.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

a. Capaian Kinerja SDGs Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2023

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meruokan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Pembangunan berkelanjutan tahun 206 sampai tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan dari *Millenium Development Goals (MDGs)/ Tujuan Pembangunan Milenium (TPM)*. MDGs hanya berfokus pada 8 (delapan) tujuan global, sedangkan pada SDGs terdapat penambahan tujuan global lainnya berdasarkan isu terkini hingga mencakup 17 (tujuh belas) tujuan global.

Dalam mendukung pencapaian SDGs 2016-2030, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mendukung pada 2 (dua) tujuan dari 17 (tujuh belas) tujuan global yang ada, yaitu pada Tujuan 9 dan Tujuan 12.

Tujuan 9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi dengan 3 (tiga) indikator di dalamnya, yaitu:

1. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB;
2. Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur; dan
3. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan dengan 1 (satu) indikator di dalamnya, yaitu Pertumbuhan ekspor produk nonmigas.

Adapun target dan realisasi indikator SDGs Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.12 Target dan Realisasi SDGs Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2023

Tujuan 19: Infrastruktur, Industri dan Inovasi							
Tujuan 9.2: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target	Realisasi	Keterangan
9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB	BPS	%	n/a	13	11,82	Tidak Tercapai
9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	%	n/a	4	4,26	Tercapai
9.2.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS	%	n/a	15	13,74	Tidak Tercapai
Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan							
Tujuan 17.11: Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020							
Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target	Realisasi	Keterangan
17.11.1. (a)	Pertumbuhan ekspor produk nonmigas	BPS	Juta USD	n/a	539,96 sd 741,72	475,24	Tidak Tercapai

b. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III. 13 Kontribusi Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	53,4%	4,96%	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai Ekspor Tahun n	US\$ 630 Juta	US\$ 475,24 Juta
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,42%	3,69%				
		3. Indeks Gini	0,423	0,449				
		4. Indeks Williamson	0,444	0,4916	Meningkatnya Industri Pengolahan	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp 34 Juta/Orang	Rp 46,06 Juta/Orang
		5. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup Baik	Cukup Baik/Sedang	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A

Penjelasan:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan diukur menggunakan 5 (lima) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Williamson, dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).
2. Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Williamson, dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) diantaranya dipengaruhi oleh nilai Perdagangan (baik dalam negeri maupun luar negeri), nilai Industri Pengolahan, serta kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level perangkat Daerah.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Perangkat Daerah yang memiliki ketugasan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan memiliki peran dalam membina pelaku usaha industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan nilai perdagangan yang tergambarkan pada perolehan nilai ekspor Tahun 2023, serta meningkatkan industri pengolahan yang tergambarkan pada perolehan nilai produktivitas tenaga kerja di sektor industri Tahun 2023.
4. Sebagai Perangkat Daerah mandiri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga diukur keberhasilan capaiannya melalui Sasaran “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah” dengan Indikator “Kategori RB Perangkat Daerah”.

Tabel III. 14 Kontribusi Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
1	Program Pengembangan Sektor Unggulan	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri	2,9%	5,13%	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Nilai Produksi IKM Industri Kreatif	Rp 6,8 Trilyun	Rp 6,804 Trilyun	100,06%

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
		Pengolahan dan Akomodasi Makanan Minum			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Perusahaan Ekspor	515 perusahaan	546 perusahaan	106,02%
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Inflasi pangan bergejolak	2,21%	6,47%	-92,76%
					Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha peserta pembiayaan yang menjadi eksportir baru	17%	45%	264,71%
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	2,21%	2,19%	100,9%

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	Rp 2,63 Milyar	Rp 9,17 Milyar	348,67%
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	412.630 Orang	294.030 Orang	71,26%
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	365 perusahaan	1.253 perusahaan	343,29%
2	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2. Survei Kepuasan Masyarakat	Tinggi 86.07 indeks		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor 100	Skor 91,85	91,85%

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
		(SKM)							

Penjelasan:

1. Pengembangan Sektor Unggulan yang diukur dengan Indikator “Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum”; dipengaruhi oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator “Nilai produksi IKM industri kreatif”, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan Indikator “Jumlah perusahaan ekspor”, Program Stabilisas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan Indikator “Inflasi pangan bergejolak”, Program Pengembangan Ekspor dengan Indikator “Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru”, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Indikator “Persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard”, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan Indikator “Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina”, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Indikator “Jumlah tenaga kerja di sektor industri”, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan Indikator “Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS”.
2. Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang diukur dengan Indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dipengaruhi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Indikator “Nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah”.

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai Ekspor Tahunan	US\$ 630 Juta	US\$ 472,3 Juta	74,97	3.843.220.900	3.797.663.790	98,81	45.557.110
2	Meningkatnya industri pengolahan	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp 34 Juta/Orang	Rp 45,68 Juta/Orang	134,35	29.546.607.580	28.582.189.721	96,74	964.417.859
3	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Peringkat Daerah	A	A	100	18.856.736.280	18.589.535.563	98,58	267.200.717
Jumlah						52.246.564.760	50.969.389.074		1.277.175.686
Total Belanja Operasional						52.246.564.760	50.969.389.074		1.277.175.686

Sumber: <http://sengguh.jogjaprovo.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Th 2023, Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Th 2023

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk sasaran 1 tidak mencapai target kinerja tahun 2023, sedangkan untuk sasaran 2 dan sasaran 3 melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 52.246.564.760,00; terealisasi Rp

50.969.389.074,00 atau 97,56% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp 1.277.175.686,00 atau 2,44% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan misalnya aplikasi JBSC (*Jogja Business Service Center*), JogjaKI, SIKONCER, E-Arsip, Jogjaplaza, dan SILDASI.
- b. Fasilitasi pembayaran digital (QRIS) bagi IKM dalam kegiatan-kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diantaranya Pameran PRJ di JIExpo Jakarta, Operasi Pasar.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi melalui skema pinjam pakai ATG dan layanan perbaikan ATG ke sentra-sentra IKM (*Service Keliling*).
- d. Menginisiasi pembuatan pembentukan Desa Devisa dengan membuat Draft Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kapasitas IKM serta UKM berorientasi ekspor di DIY antara Disperindag DIY dengan LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).
- e. Membentuk Forum Komunikasi Disperindag DIY dan Distributor dalam rangka penyediaan stok bahan pangan.
- f. Membentuk Forum Peningkatan Ekspor DIY yang melibatkan berbagai Instansi terkait.
- g. Operasi Pasar melalui Kios Segoro Amarto dalam rangka efektivitas pelaksanaan Operasi Pasar.
- h. Pemanfaatan media sosial untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi (misalnya pengumuman kurasi pameran, pengumuman seleksi anggota BPSK).

- i. Pemanfaatan fitur google (google form, google calendar, google sheet) dan *whatsapp group* untuk meningkatkan kerja kolaboratif dan efektivitas.
- j. Pemanfaatan media sosial, surat kabar online dan media televisi regional untuk publikasi kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.
- k. Melibatkan mahasiswa sebagai peserta dan agen perubahan dalam kegiatan sosialisasi (misal: mahasiswa sebagai peserta Sosialisasi Standardisasi Produk, mengadakan kelas ekspor bagi mahasiswa).
- l. Kerjasama pemasaran antara peserta pelatihan dengan instruktur.
- m. Menambahkan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik pengunjung saat pelaksanaan kegiatan pameran diantaranya menambahkan lomba untuk anak-anak saat Test Pasar, menambahkan produk tanaman di Bazaar, Pasar Murah dengan tema Family Day Out.
Pembentukan tim teknis dalam kegiatan rehabilitasi gedung pengemasan dengan melibatkan Dinas PUPR DIY dan Badan POM.

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan di tengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel III. 16 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Koordinasi Lintas Sektor	Disperindag DIY	Ketua Harian Tim P3DN DIY, melakukan monitoring dan evaluasi implementasi P3DN di Pemda DIY	Pembinaan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara terintegrasi	1. OPD Pemda DIY 2. Pelaku Usaha Industri	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 2. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Industri Pengolahan 3. Mendukung pencapaian kinerja Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Pengembangan Industri Kreatif, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Sekda DIY, Asekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Memberikan pengarahan terkait implementasi P3DN di Pemda DIY				
	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Inspektorat DIY, Bappeda DIY, BPKA DIY, DPPM DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan BLP DIY	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi P3DN di Pemda DIY				

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		BPIWP2 Setda DIY, Dinas PUP ESDM DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Perhubungan DIY	Memberikan penafsiran apabila ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri			<p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan tujuan Program P3DN 2. Mendapatkan pembinaan yang terintegrasi yang berdampak pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri di DIY
		Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Konsultasi, Koordinasi			
		Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), KADIN DIY	Edukasi, pengawasan, memberikan penafsiran apabila ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri			
		Pelaku Usaha	Memberikan masukan berupa permasalahan dan berbagai kendala dalam menyediakan barang/jasa pada e-katalog lokal sebagai bahan pembinaan			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
2.	Peningkatan Ekspor Impor DIY melalui Kolaborasi Lintas Sektor	Disperindag DIY	Melakukan pembinaan IKM Ekspor Impor DIY dari sisi peningkatan kualitas dan kuantitas produk, sertifikasi, fasilitasi promosi, penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan peningkatan kapasitas pelaku ekspor	Pembinaan ekspor secara terintegrasi	Pelaku Usaha Ekspor Impor	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Ekspor <p>Bagi Kelompok Sasaran: Mendapatkan pembinaan yang terintegrasi yang berdampak pada peningkatan usaha ekspor impornya</p>
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Melakukan pembinaan pelaku usaha pertanian dalam menyediakan bahan baku produksi produk ekspor dan menyediakan produk pertanian kualitas ekspor			
		DPPM	Pembinaan berkaitan dengan perijinan bagi pelaku usaha ekspor impor			
		Balai Karantina	Pembinaan berkaitan ekspor impor produk tanaman dan hewan			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		OPD Lainnya	Melakukan pembinaan terkait ekspor impor sesuai dengan kewenangannya			
Pelaku Ekspor Impor	Memberikan masukan berupa permasalahan dan berbagai kendala dalam menjalankan usaha ekspor impor sebagai bahan pembinaan					
3.	Optimalisasi Layanan Konsultasi Bisnis melalui Aplikasi <i>Jogja Business Service Centre</i> (JBSC)	Disperindag DIY	Admin dan konsultan permasalahan bisnis di bidang pemasaran, produksi, perlindungan Kekayaan Intelektual, pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Layanan Konsultasi Bisnis secara Online	Pelaku Usaha di DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Ekspor, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Bank Indonesia	Penyediaan Sarana dan prasarana			
		DPPM	Konsultan terkait perijinan			
		Bea Cukai	Konsultan terkait dengan kepabeanan			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Balai Karantina	Konsultan terkait kekarantinaan produk ekspor impor berupa hewan dan tumbuhan			Bagi Kelompok Sasaran: Peningkatan pengetahuan manajemen usaha
		Perbankan	Konsultasi bisnis terkait dengan transaksi keuangan			
		OPD Lainnya	Konsultan sesuai dengan kewenangannya			
		Pelaku Usaha DIY	Memberikan masukan berupa permasalahan dan berbagai kendala dalam menjalankan usaha bisnis sebagai bahan pembinaan			
4.	Pemantauan Harga dan Pengawasan Stok Bahan Pokok dan Barang Penting dalam Mendukung <i>Early Warning System</i> Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan	Disperindag DIY	Koordinator, pengelola data, pemantau di 3 (tiga) pasar percontohan Kota Yogyakarta	Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting sebagai pendukung <i>Early Warning System</i> dan bahan pertimbangan	Masyarakat	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian sasaran kinerjanya Perdagangan 2. Mendukung pencapaian program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota	Memantau stok dan harga di pasar Kabupaten/Kota dan menyampaikan data hasil pantauan untuk diolah			
		DPPM	Menerbitkan perijinan			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
	Pokok dan Barang Penting	Pelaku Usaha di DIY	Memberikan umpan balik untuk perbaikan aplikasi OSS dan layanan penerbitan perijinan	pengambilan kebijakan stabilisasi harga		<p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>1. Stabilitasnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat</p>
5.	Pemantauan Ketersediaan Pupuk melalui Komisi Pupuk	Disperindag DIY	Melakukan pengawasan distribusi pupuk	Ketersediaan Pupuk di DIY	1. Distributor Pupuk 2. Petani di DIY	<p>Bagi OPD: Mendukung pencapaian target kinerja program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</p> <p>Bagi Kelompok sasaran: Tersedianya pupuk</p>
		Disperindag DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, Polda DIY, Distributor Pusri dan Gersik.	Merumuskan kebijakan berkaitan dengan ketersediaan pupuk di DIY			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
6.	Pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Disperindag DIY	Mensuplai harga dan stok barang pokok dan bahan penting lainnya	Rekomendasi kebijakan stabilisasi harga	1. Pemda DIY 2. Masyarakat	<p>Bagi OPD: Mendukung pencapaian target kinerja program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <p>Bagi Kelompok sasaran: 1. mendapatkan rekomendasi kebijakan stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya 2. Terkendalnya harga dan stok barang pokok dan bahan penting lainnya</p>
		Bank Indonesia, Biro Perekonomian, SKPD terkait, Bulog, BUMD	Merumuskan kebijakan terkait pengendalian inflasi			
7.	Menekan lonjakan harga dan ketersediaan barang pokok dan bahan penting lainnya melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah	Disperindag DIY, Disperindag Kabupaten/Kota	Menyelenggarakan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah	Stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok dan bahan penting lainnya	Masyarakat	<p>Bagi OPD: Mendukung pencapaian target kinerja program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <p>Bagi Kelompok sasaran: 1. Terkendalnya harga dan stok barang pokok dan bahan penting lainnya</p>
		Bank Indonesia	Memfasilitasi transportasi			
		TPID DIY	Memberi masukan komoditi yang akan dijual dalam Operasi Pasar dan Pasar Murah			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Bulog, Distributor	Menyediakan bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya			
		Kepolisian setempat	Menjaga keamanan saat berlangsungnya kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah			
		Satgas Pangan Provinsi, Satgas Pangan Kabupaten/Kota	Mengawasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah			

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2023 dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2023 dihadapkan pada hambatan dan permasalahan sebagai berikut ini.
 - a. Ketatnya aturan impor ke negara-negara Eropa terutama untuk produk kayu (furniture, handicraft) sehingga pelaku usaha menjadi lebih berat untuk memenuhi persyaratan.
 - b. Krisis ekonomi di Negara-negara tujuan utama ekspor DIY seperti Amerika dan Eropa yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor komoditi pakaian jadi dan tekstil, dimana kedua komoditi tersebut merupakan komoditi ekspor DIY.
 - c. Adanya perang Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel menyebabkan biaya logistik ekspor impor mahal.
 - d. Permasalahan internal nasional masih menjadi kendala bagi para pelaku usaha seperti pajak dan perizinan usaha.
 - e. Ekspor produk Salak ke negara Vietnam, terkendala belum adanya Perjanjian Kerjasama *Government to Government* yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 - f. Dampak pandemi yang belum 100% pulih menyebabkan daya beli negara tujuan ekspor belum pulih.
 - g. Menurunnya omset selama pandemi covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini mengakibatkan melemahnya modal usaha pelaku usaha sektor industri Proses produksi sebagian IKM tidak dapat dilakukan karena biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja, energi) tidak dapat dipenuhi.
 - h. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut menyebabkan naiknya harga energi dan minyak dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya harga bahan baku impor. Imbasnya terhadap para pelaku usaha industri yang menggunakan bahan baku impor yang kesulitan yang mendapatkan bahan baku.

- i. Eropa merupakan pemasok gandum terbesar di dunia. Adanya perang Rusia-Ukraina berdampak pada kelangkaan gandum. Hal ini menjadi kendala bagi industri yang berbahan baku gandum mengingat gandum merupakan bahan baku dari produk pangan.
 - j. Kenaikan BBM menyebabkan naiknya inflasi dan harga bahan baku sehingga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya sektor industri.
 - k. Peningkatan biaya produksi seiring dengan kenaikan UMP 2023.
 - l. Ketidakpastian kondisi ekonomi global dan lesunya aktivitas ekonomi Negara-Negara ekonomi utama seperti Amerika Serikat dan Kawasan Eropa.
 - m. Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi DIY disebabkan oleh kinerja ekspor yang masih terkontraksi. Beberapa subsektor industri pengolahan yang berorientasi ekspor juga masih tumbuh melambat (seperti industri furniture dan kulit).
 - n. Kenaikan harga beras dan telur ayam ras sebagai bahan baku dari produk pangan.
 - o. Merebaknya tekstil impor ilegal hingga ke pasar-pasar eceran membuat terpuruknya industri tekstil dan produk tekstil nasional.
2. Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2023 didukung faktor-faktor sebagai berikut ini.
- a. Berkembangnya media pemasaran online.
 - b. Tumbuhnya wirausaha baru di sektor perdagangan dan sektor perindustrian.
 - c. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut sehingga aktivitas perekonomian sudah mulai membaik.
 - d. Meningkatnya aktivitas kepariwisataan.
 - e. Aktivitas industri mulai pulih yang berdampak pada aktivitas perdagangan.
 - f. Meningkatnya aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang berdampak terhadap tumbuhnya IKM pangan.
 - g. Peningkatan harga komoditi dunia sehingga mendorong peningkatan ekspor DIY.
 - h. Adanya sinyal positif pada kedua negara tujuan ekspor DIY seperti pembukaan ekonomi Tiongkok pascapandemi Covid 19.
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan berbagai upaya non budgeter untuk meningkatkan nilai ekspor DIY diantaranya adalah:

- 1) menyelenggarakan *Business Matching* bekerjasama dengan KBRI dan DPMPTSP sebanyak 10 kali selama tahun 2023 untuk mempertemukan antara Buyer dari Australia, Kanada, Mesir dengan IKM Ekspor DIY. Dari 10 *Business Matching* tersebut, semua menghasilkan Kontrak Dagang;
- 2) Kerjasama dengan Paguyuban IKM dan Universitas untuk menyelenggarakan Pelatihan Ekspor;
- 3) bekerjasama dengan Bank Indonesia, UGM, Paguyuban Salak mengadakan kajian teknologi pengawetan salak sehingga dapat didistribusikan ke negara tujuan ekspor dengan kondisi yang masih segar.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut.

1. Pemenuhan bahan baku industri dilakukan dengan mendorong penyediaan dan penggunaan bahan baku lokal serta peningkatan kemitraan dengan penyedia bahan di luar DIY, seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan daerah lainnya. Selain itu, dilakukan peningkatan pembinaan IKM terkait dengan peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standarisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing.
2. Mendorong ekspor ke negara tujuan ekspor baru seperti Timur Tengah dan Afrika serta peningkatan pemasaran domestik.
3. Mendorong penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai melalui sinergi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
4. Peningkatan pemantauan dan pengawasan barang beredar melalui sinergitas lintas sektor, serta peningkatan kesadaran produsen, konsumen, dan masyarakat umum tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen, serta optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
5. Penyediaan data harga dan stok barang pokok penting sebagai pendukung *early warning system*, serta penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah.
6. Mendorong Pemerintah Pusat untuk membuat Perjanjian Kerjasama *Government to Government* diantaranya untuk ekspor produk Salak ke negara Vietnam.
7. Memanfaatkan keberadaan Perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku-pelaku IKM di DIY.

8. Meningkatkan edukasi dan layanan konsultasi serta mendorong para pelaku usaha dalam hal perijinan usaha dan pajak.
9. Mendorong Pemerintah Pusat agar mencegah merebaknya impor ilegal.
10. Meningkatkan daya saing pelaku IKM dan mendorong optimalisasi peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2026)
						Tahun ke-1 (2022)	Tahun ke-2 (2023)	Tahun ke-3 (2024)	Tahun ke-4 (2025)	Tahun ke-5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional dan Global	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY			Rp 8.379.070 juta	Rp. 9.965.527 Juta	Rp. 10.497.686 Juta	Rp. 11.078.208 Juta	Rp. 11.709.666 Juta	Rp. 12.392.340 Juta	Rp. 12.392.340 Juta
		Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY			Rp 12.670.357Juta	Rp. 13.583.796 Juta	Rp. 13.649.081 Juta	Rp. 13.717.012 Juta	Rp. 13.787.380 Juta	Rp. 13.859.723 Juta	Rp. 13.859.723 Juta
			Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai Ekspor Tahun n	US\$ 521 Juta	US\$ 573 Juta	US\$ 630 Juta	US\$ 694 Juta	US\$ 763 Juta	US\$ 839 Juta	US\$ 839 Juta
			Meningkatnya industri pengolahan	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp 32 Juta/orang	Rp. 33 Juta/Ora ng	Rp. 34 Juta/Or ang	Rp. 35 Juta/Or ang	Rp. 36 Juta/Or ang	Rp. 37 Juta/Or ang	Rp. 37 Juta/Or ang
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta. Telepon (0274) 512063. Faksimile 581335
Website: disperindag.jogjapro.go.id Kode pos 55166

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. SYAM ARJAYANTI, M.P.A.
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BLWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapsian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BLWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DIY,

Ir. SYAM ARJAYANTI, M.P.A.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai ekspor tahun n	US\$-Juta	630	Triwulan I	157,5
					Triwulan II	315
					Triwulan III	472,5
					Triwulan IV	630
2.	Meningkatnya industri pengolahan	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp-Juta/orang	34	Triwulan I	8,5
					Triwulan II	17
					Triwulan III	25,5
					Triwulan IV	34
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Peringkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (APBD)	Rp 29.788.700
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (APBD)	Rp 1.624.883.900
3.	Program Pengembangan Ekspor (APBD)	Rp 130.212.000
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (APBD)	Rp 283.336.300
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (APBD)	Rp 1.775.000.000
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD)	Rp 9.300.249.750
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (APBD)	Rp 104.483.400
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS)	Rp 19.981.874.430
9.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp 160.000.000
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 18.856.736.280
	Jumlah Anggaran	Rp 52.246.564.760

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.

- Mengelola anggaran dekonsentrasi :

- Program Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 117.160.000
- Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 54.954.000
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Industri Rp 680.949.000
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Subkegiatan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi Rp 301.511.000
- Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 69.840.000
- Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 443.272.000

Yogyakarta, 8 November 2023





R
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telp: (0274) 562009 Fax: (0274) 512567
Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

Yogyakarta, 13-3-2023

Nomor : 700 / 0033
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
DIY Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan DIY
di -
Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022, sebagai berikut.

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

f. Keputusan

- f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2021 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 053/II/INSPI/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kabapel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi


Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka

memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

5. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai tugas 'Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan'.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
- e. Peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
- f. Fasilitasi infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri;
- g. Fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
- h. Pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
- i. Pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- j. Pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
- k. Penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- l. Pengawasan distribusi bahan berbahaya;
- m. Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Fasilitasi Angka Pengenal Impor;
- n. Pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- o. Pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- p. Fasilitasi pengembangan dan promosi produk ekspor;
- q. Pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
- r. pelaksanaan 

- r. Pelaksanaan kegiatan kesekretariat;
- s. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan;
- t. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- u. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- v. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki susunan struktur organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Substansi Program.
 - c. Bidang Industri Agro, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar; dan
 - 2) Kelompok Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
 - d. Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka; dan
 - 2) Kelompok Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - 2) Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga.
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Fasilitas Ekspor dan Impor; dan
 - 2) Kelompok Substansi Pengembangan Ekspor.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- 7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah**
Implementasi AKIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah menggunakan Aplikasi Sungguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi lain dalam peningkatan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yaitu:

- Pemanfaatan media sosial dan google untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- layanan konsultasi bisnis melalui aplikasi Jogja Business service Centre (JBSC);
- Layanan konsultasi pendampingan serta pendaftaran fasilitasi kekayaan intelektual secara online melalui aplikasi JogjaKI;
- Layanan pemasaran online melalui aplikasi Jogjaplaza dan layanan pengaduan konsumen secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER);
- Layanan pemasaran online melalui aplikasi aplikasi Jogjaplaza;
- Pengembangan aplikasi olah data SILDASI (Sistem Informasi Layanan Data sektor Industri dan Perdagangan);
- Pengembangan aplikasi monev untuk mempermudah penyusunan laporan monitoring lapangan.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah menindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan *6*

- a. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja OPD meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan ditingkatkan;
- b. Meningkatkan peran sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah DIY.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memperoleh nilai sebesar 88,85. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,81 atau 89,38 % dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,70 atau 88,00% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,34 atau 88,90 % dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 22,00 atau 88,00% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY agar:

- a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;
- b. Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, yaitu:
 - Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri; dan
 - Meningkatnya industri pengolahan.

C. PENUTUPAN

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memperoleh nilai 88,85. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



INSPEKTORAN
DAERAH

MUHAMMAD BETIADI, S.Pt., M.Acc.

Tembusan:
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2022



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Wibisono

Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 512063, Faximile 581335
Website: disperindag.jogjaprov.go.id Kode pos 55166

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP TAHUN 2022
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY

No.	Saran/Rekomendasi (Surat Inspektur DIY Nomor 700/01039, tanggal 13 Maret 2023)	Tindak lanjut
1	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;	Disperindag DIY telah dan akan menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
2	Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yaitu meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri, dan meningkatnya industri pengolahan.	Disperindag DIY telah dan akan meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yaitu meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri, dan meningkatnya industri pengolahan.

Yogyakarta, 5 Juni 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DIY,

I. SYAM ARJAYANTI, M.P.A.T



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**